



PROFIL PNS KABUPATEN BATANG

PERIODE JANUARI 2024

REGISTER BPS : K-22.3325.001

Jumlah PNS Kabupaten Batang Berdasarkan

1. PANGKAT DAN GOLONGAN
2. ESELON JABATAN
3. TINGKAT PENDIDIKAN
4. JENIS KELAMIN
5. AGAMA
6. USIA

SIMPEG BKD KAB.BATANG
BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE JANUARI 2024 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE JANUARI 2024 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE JANUARI 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 31 Januari 2024
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 METODE PENYUSUNAN DATA.....	4
1. PENGUMPULAN DATA.....	4
2. PENYAJIAN DATA.....	4
BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI.....	5
TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN.....	6
TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN.....	6
TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	7
TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	7
TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA.....	10
TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI.....	12
TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN.....	12
TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN.....	13
TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA.....	16
TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA).....	23
TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD.....	27
TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD.....	29
TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD	31
GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK.....	333

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup

pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil PNS Kabupaten Batang Bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
- f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil PNS Pemerintah Kabupaten Batang Bulan Januari 2024 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka

- perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang

1.4 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE JANUARI 2024 disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB II

HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 31 Januari 2024 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon Jabatan
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah PNS berdasarkan Agama
6. Jumlah PNS berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural
7. Jumlah PNS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
8. Jumlah PNS berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan **Januari 2024** **adalah 5.275** PNS terinci sebagai berikut :

TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	54	5	59
II/a	Pengatur Muda	32	2	34
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	76	5	81
II/c	Pengatur	203	117	320
II/d	Pengatur Tingkat I	197	55	252
III/a	Penata Muda	335	568	903
III/b	Penata Muda Tingkat I	338	472	810
III/c	Penata	237	477	714
III/d	Penata Tingkat I	335	610	945
IV/a	Pembina	337	404	741
IV/b	Pembina Tingkat I	158	189	347
IV/c	Pembina Utama Muda	48	15	63
	Jumlah	2355	2920	5275

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS terbanyak adalah PNS Golongan III (3372 PNS) , diikuti PNS Golongan IV (1151 PNS), PNS Golongan II (687 PNS) dan jumlah PNS terendah adalah PNS Golongan I (65 PNS).

TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Total
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1274	2387	3661
Jabatan Fungsional Umum	NON	826	392	1218
Jabatan Struktural	II.b	24	1	25
Jabatan Struktural	III.a	42	6	48
Jabatan Struktural	III.b	60	35	95
Jabatan Struktural	IV.a	96	70	166
Jabatan Struktural	IV.b	33	29	62
		2355	2920	5275

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa jumlah Eselon PNS terbanyak adalah Eselon IV (228 PNS), diikuti PNS Eselon III (143 PNS), PNS Eselon II (25 PNS).

TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S-3/Doktor	3	1	4
S-2	193	161	354
S-1/Sarjana	1298	1817	3115
Diploma IV	23	77	100
Diploma III/Sarjana Muda	174	690	864
Diploma II	44	23	67
Diploma I	1	4	5
SLTA Kejuruan	42	11	53
SLTA	433	120	553
SLTP Kejuruan	1	0	1
SLTP	100	8	108
Sekolah Dasar	43	8	51
Jumlah	2355	2920	5275

Dari Tabel 2.3 jumlah PNS didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 (3.115 PNS), diikuti oleh tingkat pendidikan D.III (864 PNS) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan S-3 (4 PNS)

TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	UNOR	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	14	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	10	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	31	38	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10	14	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	15	39	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	23	37
7	DINAS KESEHATAN	628	155	783
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	11	7	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	16	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	40	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	34	37	71

12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13	19	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	108	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	11	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13	13	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1595	1172	2767
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	41	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	59	71
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18	15	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	23	36
22	DINAS SOSIAL	7	12	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	24	18	42
24	KECAMATAN BANDAR	4	14	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	3	9	12
26	KECAMATAN BATANG	24	46	70
27	KECAMATAN BAWANG	4	9	13
28	KECAMATAN BLADO	5	6	11
29	KECAMATAN GRINGSING	3	8	11
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	9	10
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	6	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	16	17
34	KECAMATAN SUBAH	2	10	12
35	KECAMATAN TERSONO	3	9	12
36	KECAMATAN TULIS	2	10	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	7	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	15	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	217	110	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	67	29	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	38	44

43	SEKRETARIAT DAERAH	33	68	101
44	SEKRETARIAT DPRD	5	24	29
	Jumlah	2920	2355	5275

Dari Tabel 2.4 jumlah PNS dengan jenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak (2.920 PNS) sedangkan PNS dengan jenis kelamin laki-laki 2.355 PNS, selisih 565 PNS.

TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA

No	UNOR	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	27	0	1	0	0	0	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	67	1	1	0	0	0	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24	0	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	54	0	0	0	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36	0	1	0	0	0	37
7	DINAS KESEHATAN	773	2	7	0	1	0	783
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	18	0	0	0	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	0	0	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	0	1	0	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	71	0	0	0	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32	0	0	0	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	123	0	0	0	0	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	0	0	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26	0	0	0	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2734	12	21	0	0	0	2767
18	DINAS PERHUBUNGAN	43	1	1	0	0	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	71	0	0	0	0	0	71
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	0	0	0	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35	0	1	0	0	0	36
22	DINAS SOSIAL	19	0	0	0	0	0	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	42	0	0	0	0	0	42

24	KECAMATAN BANDAR	18	0	0	0	0	0	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	0	0	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	70	0	0	0	0	0	70
27	KECAMATAN BAWANG	13	0	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	11	0	0	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	11	0	0	0	0	0	11
30	KECAMATAN KANDEMAN	10	0	0	0	0	0	10
31	KECAMATAN LIMPUNG	10	0	0	0	0	0	10
32	KECAMATAN PEALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	12	0	0	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	12	0	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	12	0	0	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	11	0	0	0	0	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23	0	1	0	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	322	2	2	0	1	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	0	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	43	1	0	0	0	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	101	0	0	0	0	0	101
44	SEKRETARIAT DPRD	29	0	0	0	0	0	29
	JUMLAH	5213	21	39	0	2	0	5275

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah PNS dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 98% (5213 PNS) dari seluruh PNS sisanya dibagi oleh Protestan (39 PNS), Katholik (21 PNS), Budha (2 PNS) dan Hindu (0 PNS).

TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia	Terisi	Kosong
2.a	1	0	1
2.b	32	25	7
3.a	56	48	8
3.b	105	95	10
4.a	190	166	24
4.b	76	62	14
TOTAL	460	396	64

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (21 jabatan), hanya terisi 169 dari 190 jabatan yang tersedia.

TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru	4	3	7
2	Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	0	1	1
3	Guru Kelas Ahli Pertama	15	27	42
4	Guru Madya	324	448	772
5	Guru Muda	282	563	845
6	Guru Pendidikan Agama Islam Ahli Pertama	10	15	25
7	Guru Penjasorkes Ahli Pertama	3	0	3
8	Guru Pertama	195	302	497
9	Pamong Belajar Ahli Pertama	0	1	1
10	Pamong Belajar Madya	2	0	2
11	Pamong Belajar Pertama	0	1	1
12	Pamong Budaya Ahli Muda - Subkoordinator Sejarah, Tradisi Dan Tenaga Kebudayaan	0	1	1
13	Pamong Budaya Ahli Pertama	1	0	1
14	Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pai) Smp Madya	0	1	1
15	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum Dan Penilaian Smp	1	0	1
16	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum, Penilaian,	1	0	1

	Pengembangan Peserta Didik Dan Pem			
17	Pengawas Sekolah Madya	32	12	44
18	Pengawas Sekolah Madya - Tk/Sd	1	1	2
19	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
20	Penilik Madya	4	0	4
21	Penilik Muda	2	1	3
	Jumlah	878	1382	2260

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak disi oleh jabatan Guru (2217 PNS) dari 2260 PNS fungsional pendidikan, sisanya disi Pengawas (54 PNS), Penilik (7 PNS) dan Pamong belajar (6 PNS).

TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
2	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	3	4
3	Apoteker Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	4	4
4	Apoteker Penyelia	0	1	1
5	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	6	6
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non BLUD	1	1	2
7	Asisten Apoteker Penyelia	1	13	14
8	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	0	1	1
9	Bidan Ahli Madya / Madya	0	4	4
10	Bidan Ahli Muda / Muda	0	17	17
11	Bidan Ahli Pertama / Pertama	0	40	40
12	Bidan Mahir / Lanjutan	0	21	21
13	Bidan Pelaksana Lanjutan	0	96	96
14	Bidan Penyelia	0	114	114
15	Bidan Terampil / Pelaksana	0	90	90
16	Dokter Ahli Madya / Madya	0	37	37
17	Dokter Ahli Muda / Muda	22	27	49
18	DOKTER AHLI PERTAMA	0	3	3
19	Dokter Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
20	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	7	7	14
21	Dokter Gigi Ahli Pertama / Pertama	1	4	5

22	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	0	7	7
23	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	1	0	1
24	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	1	1
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	0	2	2
26	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	2	0	2
27	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
28	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	0	1	1
29	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
30	Nutrisisionis Ahli Madya / Madya NON BLUD	1	0	1
31	Nutrisisionis Ahli Muda / Muda	0	1	1
32	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama	0	6	6
33	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama BLUD	1	0	1
34	Nutrisisionis Mahir / Lanjutan	0	1	1
35	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
36	Nutrisisionis Penyelia	0	2	2
37	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	0	10	10
38	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	0	1	1
39	Penata Anestesi Ahli Madya	0	1	1
40	Penata Anestesi Ahli Muda	1	1	2
41	Penata Anestesi Ahli Pertama	2	0	2
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	3	4
43	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA NON BLUD	1	0	1
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	1	0	1
45	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA - NON BLUD	2	0	2
46	Perawat Ahli Madya	0	1	1
47	Perawat Ahli Muda	8	21	29
48	Perawat Ahli Pertama	13	18	31
49	Perawat Gigi Ahli Muda	15	6	21
50	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	0	1	1
51	Perawat Gigi Penyelia	1	2	3
52	Perawat Gigi Terampil	1	16	17
53	Perawat Madya	1	5	6
54	Perawat Mahir	4	9	13
55	Perawat Muda	1	5	6

56	Perawat Pelaksana	4	10	14
57	Perawat Pelaksana Lanjutan	2	0	2
58	Perawat Penyelia	4	15	19
59	Perawat Pertama	63	144	207
60	Perekam Medis Pelaksana	1	1	2
61	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	5	6	11
62	Perekam Medis Penyelia	1	0	1
63	Perekam Medis Penyelia NON BLUD	1	5	6
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	0	1
65	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	1	0	1
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	0	2	2
67	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	2	3
68	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia NON BLUD	1	6	7
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	0	1	1
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non BLUD	5	8	13
71	Radiografer Pelaksana	3	1	4
72	Radiografer Penyelia	0	2	2
73	Refraksionis Optisien Penyelia	3	3	6
74	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	0	1	1
75	Sanitarian Ahli Madya / Madya	0	2	2
76	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	0	2	2
77	Sanitarian Penyelia	1	1	2
78	TEKNIK ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	4	6
79	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	1	0	1
80	Teknisi Elektromedis Pelaksana	0	1	1
81	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	3	0	3
82	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	0	1	1
83	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	2	0	2
84	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	1	2
	Jumlah	1	0	1
		200	834	1034

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak diisi oleh jabatan Bidan (415 PNS) dari 1034 PNS.

TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN	1	0	1
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DATA, INFORMASI DAN KERJASAM	0	1	1
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	1	0	1
5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA (PB)	0	1	1
6	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	0	1	1
7	ANALIS HUKUM AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	0	1	1
8	ANALIS HUKUM MUDA (PB)	0	1	1
9	ANALIS KEBENCANAAN MUDA (PB)	2	0	2
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	1	4	5
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	0	1
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR ASPIRASI DAN DOKUMENTASI	1	0	1
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	1	0	1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGANGGARAN	1	0	1
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGAWASAN	1	0	1
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	0	1	1
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1	0	1
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	1
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	1	1
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1	0	1
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYUSUN PROGRAM	1	0	1
22	ANALIS KEBIJAKAN MUDA (PB)	5	3	8
23	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	0	1	1

24	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	1
25	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	1	0	1
26	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	0	3	3
27	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2	2	4
28	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA (PB)	2	4	6
29	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
30	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA	0	1	1
31	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	1	0	1
32	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	0	1	1
33	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	0	1	1
34	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENELITIAN	0	1	1
35	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN PASAR	1	0	1
36	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	0	1	1
37	ANALIS PERDAGANGAN MUDA (PB)	2	0	2
38	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	2	0	2
39	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	0	1	1
40	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA (PB)	1	6	7
41	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	1	2
42	ARSIPARIS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1	0	1
43	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	2	2
44	Arsiparis Mahir	0	1	1
45	ARSIPARIS MUDA (PB)	0	1	1

46	Arsiparis Pelaksana	0	2	2
47	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
48	Arsiparis Penyelia	2	0	2
49	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	1
50	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	0	5
51	AUDITOR AHLI PERTAMA	0	3	3
52	Auditor Madya	2	1	3
53	Auditor Muda	3	7	10
54	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	2	0	2
55	Instruktur Muda	0	1	1
56	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	0	1	1
57	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	0	1
58	Medik Veteriner Muda (PB)	0	1	1
59	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
60	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	1	0	1
61	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	0	1	1
62	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
63	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
64	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN OLAHRAGA	0	1	1
65	Pemadam Kebakaran Terampil	3	0	3
66	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	1	1	2
67	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI, PENGENDA	0	1	1
68	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUAR	1	0	1
69	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGGERAKAN INSTITUSI DAN PERA	1	0	1
70	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYULUH DAN PENGGERAKAN	0	1	1
71	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA (PB)	0	1	1
72	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEDARURATAN DAN LOGISTIK	0	1	1

73	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA (PB)	1	1	2
74	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	1	2	3
75	PENATA RUANG AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG	1	0	1
76	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	1	2
77	PENATA RUANG MUDA (PB)	0	1	1
78	Penera Ahli Pertama	0	2	2
79	Penera Pelaksana	1	1	2
80	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	0	1	1
81	Pengantar Kerja Pertama	0	2	2
82	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	1	0	1
83	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
84	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
85	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	0	1
86	Pengawas Bibit Ternak Pertama	0	1	1
87	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA (PB)	1	0	1
88	Pengawas Kemetrolgian Pertama	1	0	1
89	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, PERIJINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERAT	1	0	1
90	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
91	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	1	0	1
92	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN	1	0	1
93	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA (PB)	0	1	1
94	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
95	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
96	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	4	0	4
97	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	1	6	7

98	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	0	1	1
99	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	0	1
100	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	0	1	1
101	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
102	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	1	0	1
103	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	0	3
104	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	6	0	6
105	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1	0	1
106	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA (PB)	0	1	1
107	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0	1	1
108	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH	1	0	1
109	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA (PB)	0	1	1
110	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA/TERAMPIL	0	1	1
111	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	0	1	1
112	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	0	1	1
113	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI	1	0	1
114	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	1	0	1
115	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	0	1
116	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA (PB)	2	2	4
117	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	0	2
118	PENYULUH PERINDUSTRIAN MUDA (PB)	2	0	2
119	Penyuluh Pertanian Madya	9	1	10
120	Penyuluh Pertanian Muda	7	4	11
121	PENYULUH PERTANIAN MUDA (PB)	0	2	2
122	Penyuluh Pertanian Pelaksana	0	2	2
123	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12

124	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	1	1
125	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	0	2
126	PENYULUH SOSIAL MUDA (PB)	1	0	1
127	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1	1
128	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1	0	1
129	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMERINTAHAN	0	1	1
130	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	1
131	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	0	1
132	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM	3	0	3
133	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	2	1	3
134	Perencana Muda	0	1	1
135	PERENCANA MUDA (PB)	8	5	13
136	Perencana Pertama	2	2	4
137	PERISALAH LEGISLATIF MUDA (PB)	1	0	1
138	Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana	3	0	3
139	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	1
140	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA (PB)	1	1	2
141	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	1	1
141	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	0	2	2
142	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	1	0	1
143	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	0	1
144	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	0	1	1
145	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0	1
146	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1	0	1
147	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
148	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9
149	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BLUD	0	1	1
150	Pranata Komputer Pertama	4	3	7
151	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	1	3	4
152	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL BLUD	1	0	1

153	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR LAYANAN, INFORMASI, OTOMASI DAN KERJASAMA	0	1	1
154	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	0	1	1
155	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
156	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
157	SANDIMAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	1	0	1
158	STATISTISI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR STATISTIK SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN BUDAYA	1	0	1
159	STATISTISI MUDA (PB)	0	1	1
160	Statistisi Pelaksana	0	1	1
161	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
162	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	3	0	3
163	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA (PB)	1	0	1
164	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
165	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	1	0	1
166	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	1	0	1
167	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1
168	Teknik Pengairan Pelaksana	2	0	2
169	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAWAS	1	0	1
170	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
171	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS P	0	1	1
172	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	0	1	1
173	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRAS	1	0	1
174	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	1	0	1
175	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
176	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
177	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
178	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
	JUMLAH	196	171	367

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (37 PNS) dari 367 PNS fungsional Lainnya.

TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
2	AJUDAN	0	1	1
3	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
4	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	0	1	1
5	ANALIS BENCANA	1	1	2
6	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
7	ANALIS DIKLAT	0	1	1
8	ANALIS HUMAS	1	2	3
9	ANALIS IDEOLOGI	1	0	1
10	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	0	1
11	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	0	1
12	ANALIS JABATAN	0	1	1
13	ANALIS KEBAKARAN	0	1	1
14	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	0	1
15	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	0	1	1
16	ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	0	1
17	ANALIS KEMASYARAKATAN	0	1	1
18	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	0	5
19	ANALIS KESEHATAN	2	1	3
20	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	0	1
21	ANALIS KEUANGAN	0	2	2
22	ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	0	1
23	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	0	1
24	ANALIS LAYANAN UMUM	5	8	13
25	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1
26	ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
27	ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
28	ANALIS PARIWISATA	0	1	1
29	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	1	0	1
30	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
31	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	1	1	2
32	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
33	ANALIS PENDIDIKAN	2	0	2
34	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	0	2
35	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	0	1	1
36	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1
37	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	0	2
38	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	0	1
39	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
40	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	0	1
41	ANALIS PERBENDAHARAAN	1	0	1
42	ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
43	ANALIS PERPUSTAKAAN	1	0	1
44	ANALIS PERTANAHAN	0	1	1
45	ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
46	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	0	1	1

47	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	0	2
48	ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
49	ANALIS PROTOKOL	1	2	3
50	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	0	1	1
51	ANALIS TAMAN	1	0	1
52	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	0	1	1
53	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	1	3
54	BENDAHARA	6	5	11
55	BIDAN TERAMPIL	0	5	5
56	BINATU RUMAH SAKIT	2	0	2
57	DOKTER GIGI - AHLI PERTAMA	0	1	1
58	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	0	1
59	GURU	8	4	12
60	GURU KELAS AHLI PERTAMA	16	49	65
61	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	0	1	1
62	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	44	55	99
63	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	1	1	2
64	JURU PUNGUT RETRIBUSI	43	2	45
65	OPERATOR ALAT BERAT	1	0	1
66	OPERATOR MESIN	1	0	1
67	OPERATOR RADIO	1	1	2
68	OPERATOR TERMINAL	15	0	15
69	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	1	0	1
70	PEMELIHARA JALAN	12	0	12
71	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	0	1
72	PENELAHAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	0	1
73	PENELAHAH PERKEMBANGAN BUMD	1	0	1
74	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0	1
75	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	1
76	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
77	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	1	3
78	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	2	3
79	PENGADMINISTRASI UMUM	286	87	373
80	PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	7	15
81	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	0	1
82	PENGAWAS KOPERASI	1	0	1
83	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	0	1
84	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	0	1
85	PENGELOLA ADAT DAN Kesenian	2	0	2
86	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	1	3
87	PENGELOLA BARANG	1	0	1
88	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4	4	8
89	PENGELOLA BENGKEL	2	0	2
90	PENGELOLA DATA	9	7	16
91	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	0	2
92	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	0	3
93	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
94	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	0	1
95	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	3	4	7

96	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	0	1	1
97	PENGELOLA GAJI	0	1	1
98	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
99	PENGELOLA KEPERAWATAN	1	0	1
100	PENGELOLA KEUANGAN	51	48	99
101	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	0	1	1
102	PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
103	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	0	3	3
104	PENGELOLA PASAR	1	0	1
105	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	0	1
106	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
107	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
108	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	0	2
109	PENGELOLA PENDAPATAN	2	0	2
110	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	0	1
111	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI PERTAMA	0	2	2
112	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
113	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	1	1
114	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
115	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	2	3
116	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	0	1	1
117	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	0	1
118	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1
119	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
120	PENGEMUDI	11	0	11
121	PENGEMUDI AMBULANCE	4	0	4
122	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	0	1
123	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	0	1
124	PENJAGA PINTU AIR	6	0	6
125	PENYULUH KEPEMUDAAN	1	0	1
126	PENYULUH KOPERASI	0	1	1
127	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
128	PENYULUH WISATA	1	0	1
129	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	5	12
130	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1	0	1
131	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1	0	1
132	PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	0	1
133	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	0	1
134	PETUGAS KEAMANAN	4	0	4
135	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	13	0	13
136	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	0	1	1
137	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA / TERAMPIL	2	1	3
138	PRAMU BAKTI	102	6	108

139	PRAMU KEBERSIHAN	42	2	44
140	PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	0	1	1
141	PRANATA KEARSIPAN	0	1	1
142	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	1
143	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
144	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
145	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	0	1
146	PRANATA TATA PRAJA	1	1	2
147	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	2	0	2
148	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	6
149	TENAGA GURU	1	10	11
150	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
	JUMLAH	826	392	1218

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum terbanyak dari jabatan Pengadministrasi Umum (388 PNS) dari 1.218 PNS fungsional umum.

TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	1	5	1	7	1	2	9	1	1	0	0	0	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	7	1	0	1	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	1	0	2	2	3	13	19	9	9	9	1	1	0	0	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7	7	3	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	0	0	1	7	3	10	5	7	3	2	7	7	1	1	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	18	3	3	7	0	4	1	1	0	0	0	37
7	DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	0	6	48	25	211	116	153	159	15	29	20	0	0	783
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	6	2	1	1	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	2	1	2	4	4	1	9	2	1	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	15	3	3	5	8	0	4	1	7	4	0	1	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	0	0	1	0	0	2	2	7	17	7	20	6	7	2	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	2	0	0	4	5	5	1	2	8	3	1	1	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	15	7	10	28	14	17	13	5	8	5	0	1	0	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	3	6	2	1	1	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	1	0	0	1	2	3	4	2	5	7	0	1	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	5	2	4	0	1	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	4	3	11	25	72	79	454	422	387	468	579	252	11	0	0	2767
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	3	0	1	9	7	12	5	0	4	3	0	1	0	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	0	1	9	2	9	7	13	12	4	5	6	3	0	0	0	0	71
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	1	2	0	9	8	4	6	1	1	1	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	1	7	5	6	3	1	9	2	1	1	0	0	36
22	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	2	4	2	1	0	0	0	19

23	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	1	0	7	2	6	12	7	3	3	0	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	3	1	1	0	0	0	0	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	0	0	0	0	4	3	7	9	27	8	9	3	0	0	0	0	70
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	1	1	2	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	3	2	0	1	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	1	0	0	0	0	11
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	1	1	0	0	0	10
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	1	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	0	0	0	2	5	2	3	2	2	1	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	1	0	1	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	3	1	1	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	0	1	1	0	0	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	3	0	1	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	0	0	1	3	3	4	4	3	3	1	1	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	0	1	1	0	4	23	9	23	59	44	95	38	25	5	0	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	0	0	0	0	32	1	14	18	14	12	4	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	2	1	1	9	11	3	4	5	3	4	1	0	0	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	1	0	2	7	7	27	18	7	12	6	7	7	0	0	101
44	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	1	0	1	1	4	5	4	5	3	3	1	1	0	0	29
	Jumlah	0	0	6	59	34	81	320	252	903	810	714	945	741	347	63	0	0	5275

TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	< 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	> 61	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	8	4	10	6	0	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2	2	6	8	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	4	14	30	21	0	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	4	5	12	3	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	11	10	19	14	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	7	14	6	10	0	37
7	DINAS KESEHATAN	0	25	281	304	173	0	783
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	4	4	5	5	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	4	2	10	10	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	1	3	25	22	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	5	19	26	21	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	4	3	9	16	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	9	16	41	57	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	2	1	11	6	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2	3	9	12	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	2	9	9	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	111	611	764	1281	0	2767
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	9	4	16	16	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	5	4	21	41	0	71
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	2	6	14	11	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	6	5	18	7	0	36
22	DINAS SOSIAL	0	2	4	7	6	0	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	3	7	18	14	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	4	3	11	0	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	1	5	6	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	2	9	34	25	0	70

27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	4	9	0	13
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	3	8	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	2	4	5	0	11
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	1	2	7	0	10
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	5	5	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	3	6	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	5	12	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	2	2	8	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	4	8	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	1	11	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	3	1	7	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	4	2	7	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	2	3	10	9	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	17	75	185	50	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	28	32	30	6	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	4	8	14	18	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	14	21	35	31	0	101
	SEKRETARIAT DPRD	0	1	6	12	10	0	29
	Jumlah	0	298	1195	1754	2028	0	5275

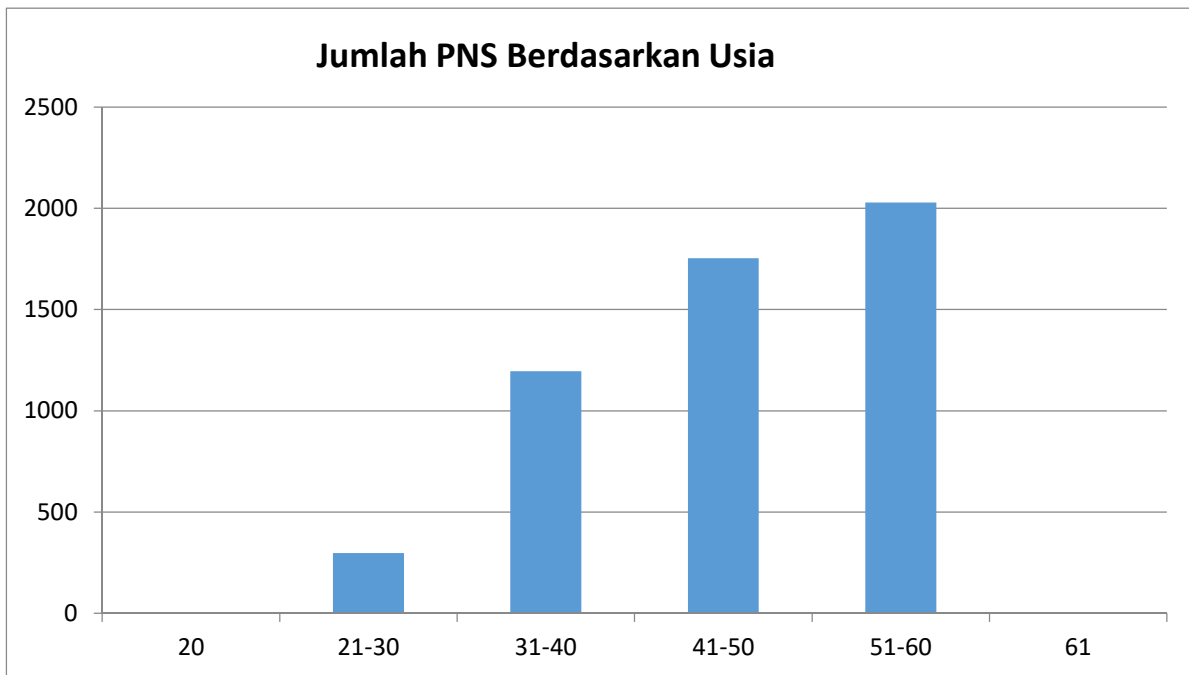
TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	3	0	0	5	1	15	4	0	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	2	0	0	1	0	11	3	1	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1	2	12	0	0	5	3	35	11	0	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	1	0	0	1	0	17	4	1	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	4	15	0	0	10	3	14	8	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	7	0	0	19	0	10	1	0	37
7	DINAS KESEHATAN	1	5	52	3	0	498	51	157	16	0	783
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	1	0	0	1	1	11	4	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	2	4	0	0	1	0	13	6	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	12	10	0	0	2	0	13	2	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1	0	2	0	0	5	4	55	4	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	2	7	0	0	2	1	14	5	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13	16	49	0	0	10	4	27	4	0	123
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	0	0	5	0	7	5	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	4	0	0	0	0	15	6	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	4	0	0	1	1	9	5	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	34	188	0	63	25	6	2285	159	1	2767
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	0	19	0	2	11	0	6	4	0	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5	15	29	0	0	4	0	16	2	0	71
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	9	0	1	8	1	11	3	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	9	0	0	5	0	17	4	0	36
22	DINAS SOSIAL	0	1	3	1	0	2	1	7	4	0	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	1	0	0	1	0	31	7	1	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	1	11	0	0	1	0	3	2	0	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	4	0	0	0	1	6	1	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	2	23	0	0	4	3	36	2	0	70
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	8	0	0	0	0	3	2	0	13

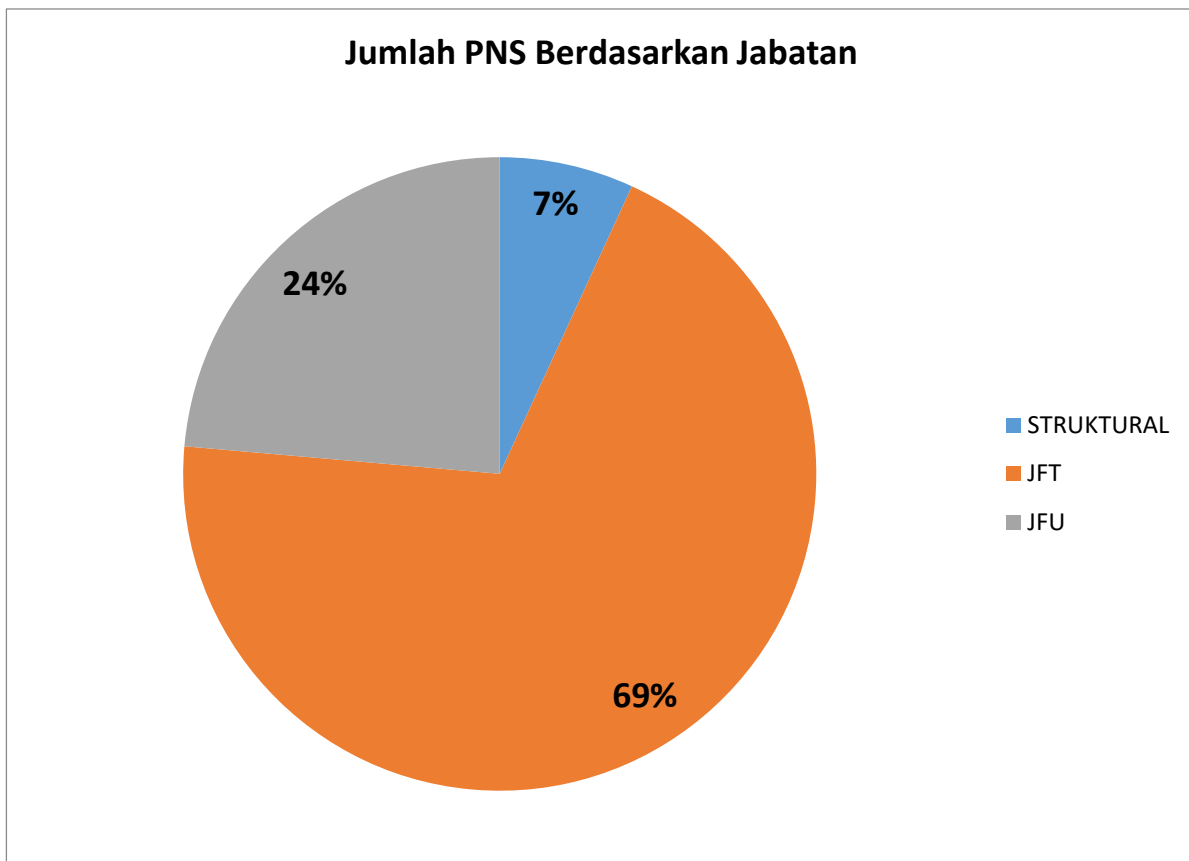
28	KECAMATAN BLADO	1	2	1	0	0	0	0	6	1	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	5	0	0	0	0	4	2	0	11
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	4	0	0	0	0	5	1	0	10
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	1	2	0	0	1	0	4	2	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	3	0	0	0	0	4	2	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	9	0	0	0	0	6	2	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	1	3	0	0	0	0	8	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	6	0	0	1	0	4	1	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	3	0	0	0	0	7	2	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	3	0	0	0	0	6	2	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	1	3	0	0	1	0	6	2	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	6	0	0	2	1	11	3	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	2	4	31	1	0	162	6	103	18	0	327
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	3	0	0	57	5	22	9	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	0	16	0	1	5	0	16	4	0	44
43	SEKRETARIAT DAERAH	1	0	21	0	0	6	6	46	21	0	101
44	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	0	0	2	1	13	4	0	29
	Jumlah	51	109	606	5	67	864	100	3115	354	4	5275

GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK

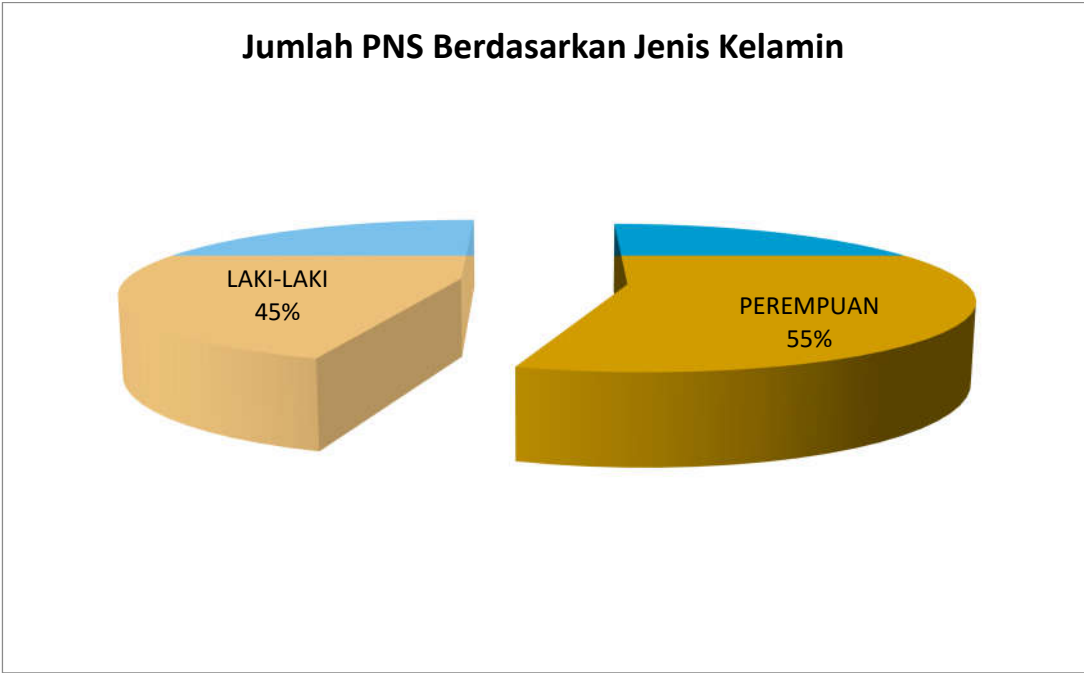
a. Berdasarkan Usia



b. Berdasarkan Jenis Jabatan



c. Berdasarkan Jenis Kelamin



d. Berdasarkan Agama

